



Suara Parlemen

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN

PIWK Tahun 2024 Gunungkidul Rp 23 Miliar



Wakil Bupati menyerahkan nota pengantar program PIWK kepada pimpinan sidang

KR-Endar Widodo

WONOSARI (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) segera akan membahas Rancangan Rancangan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon (PIWK) Tahun Anggaran 2024 setelah Wakil Bupati Gunungkidul Heri Susanto SKom MSi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Pagu Indikatif Wilayah Kapanewon Tahun 2024 sebesar Rp 23 miliar dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Wiwik Widiastuti SE MM, Rabu (7/12). Rapat yang dihadiri Anggota DPRD dan kepala-kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berlangsung singkat ditandai dengan penyerahan dokumen dari pemerintah kepada legislatif. "Legislatif segera akan melakukan pembahasan dan perhitungan PIWK," kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Wiwik Widiastuti SE MM, Sabtu (10/12).

Forum ini, kata Heri Susanto SKom MSi, merupakan forum sangat strategis bagi kita, sebagai perwujudan keberpihakan kita pada percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Pembangunan prioritas daerah harus diarahkan untuk memastikan terwujudnya peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan bekerja dengan memperluas lapangan usaha, akses dan kualitas layanan publik, serta daya saing daerah. Visi misi yang sudah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 adalah Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026. RPJMD Tahun 2021-2026 memfokuskan pada upaya meningkatkan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, investasi dan pariwisata sebagai upaya percepatan pemulihan kondisi sosial ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Rancangan PIWK Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk memberi arah dan pedoman pada Musrenbang RKPD Kapanewon dalam penyampaian usulan program dan kegiatan prioritas dari masyarakat sebagai wujud pendekatan partisipatif, agar usulan prioritas masyarakat dapat diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Dalam rancana perhitungan sebaran PIWK tahun 2024, Kapanewon Panggang Rp 1.288.500.000, Purwosari Rp 1.288.500.000,- Paliyan Rp 1.231.500.000,- Saptosari Rp 1.232.500.000,- Tepus Rp 1.247.500.000,- Tangjursari Rp 1.225.500.000,- Rongkop Rp 1.230.500.000,- Girisubo Rp 1.278.500.000,- Semanu Rp 1.354.500.000,- Ponjong Rp 1.281.500.000,- Karangmojo Rp 1.346.500.000,- Wonosari Rp 1.360.500.000,- Playen Rp 1.377.500.000,- Patuk 1.313.500.000,- Gedangsari Rp 1.233.500.000,- Nglipar Rp 1.232.000.000,- Ngawen 1.230.500.000,- dan Semin Rp 1.267.000.000,-. Indikasi tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 diharapkan dapat bersinergi pula dengan 5 (lima) fokus kerja Presiden Republik Indonesia Tahun 2019-2024 yang berfokus pada, Pembangunan sumber daya manusia, Pembangunan infrastruktur; Penyederhanaan regulasi, Penyederhanaan birokrasi, Transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi. Oleh karena itu, program dan kegiatan yang didanai alokasi PIWK Tahun 2024 diupayakan dapat menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. (Ewi/Ded)

KOMISI C DPRD INGATKAN DPU DAN DLH

Ancaman Keterlambatan dan Kualitas Proyek Penataan Kota

DALAM pemantuan proyek penataan Kota Wonosari, meliputi pembangunan jalur Siyono-Kranon dan alun-alun Wonosari beberapa hari lalu, Komisi C DPRD Gunungkidul mengingatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPU-PRKP) potensi ancaman keterlambatan dan rendahnya kualitas proyek. Untuk jalur Siyono-Kranon saat peninjauan minggu pertama bulan Desember baru mencapai 60 persen. Dalam waktu kurang satu bulan, bisa tidak selesai. Melihat cara pengerjaannya, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Demas Kursiswanto AMd kemungkinan tidak selesai sesuai jadwal. Pekerjaan utama penataan trotoar, masih banyak yang belum dikerjakan. Selain lambat komisi yang membidangi pembangunan ini melihat pengerjaan tidak rapi dan banyak penataan batuan tidak serasi. "Untuk keterlambatan sudah diatur dengan denda, tetapi jika pengerjaan tidak sesuai dengan rencana kerja dan syarat-syarat dan tidak rapi, pemerintah jangan menerima pekerjaan tersebut," kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul Demas Kursiswanto AMd, Sabtu (10/12).

Proyek senilai Rp 7,687 miliar ini selain menata trotoar juga mengganti tanaman perindang di ruas Jalan Yogyakarta-Wonosari dalam kawasan Bundaran Siyono hingga Simpang tiga Kranon. Trotoar diperbaiki

agar lebih representatif. Pohon-pohon lama ditebang akan diganti dengan 150 pohon asam jawa yang merupakan cirikhwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan penanaman jarak tanam yang diatur. Selain jalur Siyono-Kranon juga ada proyek penataan alun-laun Wonosari. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diberikan kewenangan untuk menata kembali kawasan Alun-Alun Wonosari. Penataan ini berdasarkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk melakukan pemeliharaan dan normalisasi Alun-Alun Wonosari. Normalisasi dimulai dari penataan ketinggian permukaan alun-alun, khususnya sebelah barat dan timur. Selanjutnya, penataan ulang tanaman yang ada di sekitar Alun-Alun Wonosari, dalam hal ini termasuk melakukan penanaman rumput. Pengerjaan proyek penataan alun-laun ini juga bermasalah, selain lambat dan akan tidak selesai sesuai jadwal, pengerjaannya juga tidak memuaskan. Bahkan dari perencanaan kurang diserasikan dengan lingkungannya. Orang awam saja melihat penataan ini tidak tegarap sejak perencanaan, sehingga setelah selesai nanti kesannya tidak sinkron dengan lingkungannya. Seharusnya meskipun pembangunan dilakukan secara bertahap, mesti diserasikan, dimana jika pembangunan tidak berkelanjutan pada tahun berikutnya tetap kelihatan serasi dan indah dipandang. (Ewi/Ded)

LUMBUNG MATARAM JADI AGROEDUWISATA Menuju Kemandirian Pangan Kabupaten Gunungkidul

KALURAHAN Bendung, Kapane-won Semin menjadi percontohan lumbung pangan tingkat DIY. Lumbung Mataram ini sebagai pilot proyek Pemda DIY untuk mewujudkan DIY mandiri pangan. Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE yang melakukan peninjauan lumbung pangan ini memberikan dukungan dan mengapresiasi kepada pemerintah kalurahan, selain menjadi contoh, pengelolaannya cukup bagus dan sentral disekitar balai Kalurahan. Program kemandirian pangan DIY yang juga termasuk Gunungkidul ini cukup strategis karena pada tahun 2023 ada prediksi akan mengalami krisis pangan dan energi. "Kabupaten Gunungkidul selain terus memacu produksi pangan secara rutin juga menjadi pilot proyek lumbung pangan tingkat DIY," kata Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih SE, Sabtu (10/12).

Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), pada program lumbung pangan Mataram seluas 2.000 meter persegi. Sepintas terbilang kecil, tetapi sebagai awal upaya menuju kemandirian pangan sudah cukup produktif dan masif. Pada kenyataannya masyarakat sudah dapat mencontoh dan menikmati program ini untuk ditiru dalam pekarangan rumah masing-masing. Lahan seluas 2.000 meter persegi sekedar demplot, selanjutnya dikembangkan untuk di tiru masing-masing kepala keluarga



Ketua DPRD Endah Subekti Kuntariningsih SE meninjau lumbung Mataram di Bendung, Semin

KR-Endar Widodo

(KK). Dulu ada lumbung hidup, ada apotik hidup dan warung hidup. "Itu merupakan basis konsep pengembangan lumbung Mataram yang mendapatkan anggaran dari Dana Keistimewaan sebesar Rp 750 juta," kata Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul Ir Raharjo Yuwono MSi.

Lumbung Mataram tidak hanya menanam pangan dan hortikultura, tetapi juga ada peternakan kambing sementara ini 200 ekor, kemudian berbagai jenis tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Lumbung Mataraman adalah lumbung hidup di pekarangan de-

ngan menanam apa yang dimakan dan makan apa yang ditanam. Jadi jenis makanannya dinamis tidak terpaku dengan jenis tanaman tertentu, bahkan ada yang memagar tanaman pangan pengembangan angrek. Lumbung Mataram Kalurahan Bendung berkembang pesat, selain sudah ditiru masyarakat, juga berkembang menjadi Agroeduwisata. Beberapa hari ini mendapatkan kunjungan dari berbagai kabupaten kota di Indonesia. Ada yang datang dari Kabupaten Konawe Utara Kendari. (Ewi/Ded)

KOMISI A DPRD JARING ASPIRASI 36.417 Orang Dapat Modal Dari UPK Gunungkidul

DALAM rangka menjaring aspirasi masyarakat, Komisi A DPRD Gunungkidul dipimpin ketuanya Sarjono SE mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang sedang mengadakan rapat koordinasi di Pantai Sili, Kapanewon Tepus. Pertemuan tersebut juga dihadiri Penewu Tepus Alsito, Khairun dari Dinas Pemberdayaan. Sementara dari Komisi A selain ketua juga hadir Wakil Ketua Marsubrata SIP, H Suyanto SE, Yulinda Dwi Nur Respati SE, Dra Endang Sri S MAP dan Heri Purwanto. Dalam kesempatan tersebut komisi mendapatkan masukan atas tranformasi UPK menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama (BUMKALMA) yang belum diikuti regulasi yang lengkap, menyebabkan berbagai masalah dalam penerapannya. Banyak anggota Asosiasi UPK berharap DPRD dan eksekutif segera memberikan pedoman baik peraturan bupati (Perbup) maupun peraturan teknis lainnya. Agar memudahkan dalam operasional di lapangan. Termasuk dalam pengenalan pajak, karena BUMKALMA banyak bergerak dalam kepedulian sosial.

Sementara Ketua Asosiasi UPK Gunungkidul Alfian Darmawan menjelaskan peran UPK dalam membangkitkan ekonomi masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di Kabupaten Gunungkidul yang cikal-bakal nya berasal dari dana hibah program penanggulangan kemiskinan lewat mekanisme bantuan sosial yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sebagai upaya menyikapi krisis ekonomi 1997-1998. Pengalokasian dan penge-lontoran dana bantuan sosial melalui UPK khususnya di Kabupaten Gunungkidul te-



Komisi A bersama Asosiasi UPK se Kabupaten Gunungkidul di Sili Kapanewon Tepus

KR-Endar Widodo

lah mulai diterima dari tahun 1999 dan secara resmi alir dana tersebut berakhir ditahun 2014. Salah satu rangkaian dari program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud di atas yang cukup populer di kalangan masyarakat dan menjadikan UPK sebagai sumber pengelolaan kegiatan dan pendanaannya adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau disingkat PNPMP-MPd. Melalui PNPMPd inilah UPK mengelola kegiatan dan dana bantuan sosial yang berpusat pada partisipasi dan pemberdayaan masyarakat secara langsung ditingkat kapanewon dalam naungan badan kerja sama antar desa. Adapun kegiatan dan dana yang dikelola meliputi peningkatan sarana prasarana; peningkatan kapasitas hidup bidang kesehatan dan pendidikan; serta penyediaan layanan dalam bidang ekonomi melalui sistem dana bergulir masyarakat yang berkaitan dengan permodyaan yang mudah diakses, murah, dan tanpa agunan bagi masyarakat kurang mampu atau membutuhkan.

Berakhirnya PNPMP-MPd di tahun 2014 praktis hanya menyisakan kegiatan dana

bergulir masyarakat yang hingga saat ini atau lebih dari 2 dekade telah dikelola UPK Kabupaten Gunungkidul dengan sangat baik. Dana bergulir masyarakat yang disalurkan melalui Simpan Pinjam Khusus Kelompok Perempuan atau disebut SPP dan Usaha Ekonomi Produktif atau disebut UEP telah mampu dilestarikan, berkembang, dan bermanfaat untuk masyarakat di masing-masing kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Dari total dana Bantuan Langsung Masyarakat atau BLM awal dari dana hibah bantuan sosial yang diterima dan kelola oleh UPK sebesar Rp 38.094.851.245,- dikembangkan 18 UPK di 18 kapanewon hingga mencapai angka Rp 180.323.181.022 (total aset per 31 desember 2021), rekapitulasi utuk tahun 2022 belum masuk. Dari kegiatan pengelolaan dana bergulir masyarakat UPK Kabupaten Gunungkidul juga telah mampu melayani 4.589 kelompok pemijam dengan 36.417 orang anggota pemanfaat yang tersebar di 18 kapanewon. UPK setiap tahunnya menyalurkan dana sosial dengan berbagai model baik Bantuan Langsung Tunai atau ban-

antuan alat usaha bagi masyarakat miskin, kelompok-kelompok ekonomi produktif, bantuan bagi kemanfaatan pelayanan masyarakat, bantuan tanggap bencana, serta bantuan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di tingkat kalurahan yang dana tersebut dialokasikan secara khusus dari laba hasil usaha UPK. Di tahun 2021 total dana sosial yang telah disalurkan UPK se-Kabupaten Gunungkidul sebesar Rp 2.466.299.068,-. Adanya perubahan atau transformasi pengelolaan dana bergulir masyarakat eks. PNPMP-MPd menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama diharapkan mampu untuk mempertahankan pola-pola penanggulangan kemiskinan yang telah dibentuk, diorganisir, dan dikembangkan UPK. Selain itu dengan adanya transformasi harapannya UPK mampu melebarkan jangkauan atau akses kerjasama usaha UPK diberbagai bidang dengan berbagai instansi dan lembaga pemerintah maupun swasta kearah yang lebih maju, mandiri, bermanfaat, dan berpengaruh luas bagi kesejahteraan masyarakat dimasing-masing kalurahan. (Ewi/Ded)

POJOK BACA TANGKAL BERITA HOAX

Komisi D Apresiasi Literasi Masuk Desa

KOMISI D - DPRD Gunungkidul mengapresiasi literasi masuk desa (kalurahan) sehingga masyarakat pedukuhan dan kalurahan mendapatkan referensi informasi dan pengetahuan semakin banyak. Gerakan membangkitkan minat baca ini perlu terus digalakan agar masyarakat gemar membaca dan terus belajar, baik di perpustakaan maupun membaca dalam berita-berita dedia cetak, online dan media lain yang kredibel. "Po-jok baca menjadi sumber konformasimasi terhadap berita yang semakin banyak, agar tidak termakan berita yang ti-

dak benar," kata Ketua Komisi D DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi, Sabtu (10/12). Sebagaimana diketahui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Gunungkidul terus mengencarkan budaya literasi. Setelah terpilih duta baca kabupaten, sudah dibentuk duta literasi di masing-masing sekolah, sekarang budaya literasi mulai merambah di pedesaan. Bekerja sama dengan Himpunan Program Studi Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta mendirikan Pojok Baca Shining Village (Desa

Bersinar). Untuk tahap pertama pojok baca didirikan di Pedukuhan Besari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari. Berdasarkan penelitian generasi yang tingkat literasinya rendah mempunyai potensi termakan berita hoaks (informasinya tidak benar), karena mereka akan menerima informasi secara mentah tanpa di cek kebenarannya. Pojok desa ini, kata Kepala Dispusip) Gunungkidul Drs Kisworo MPd, salah satu cara untuk memerangi berita-berita hoaks. Sebagaimana diketahui Peresmian dilakukan bersama Ketua Program Studi

Ilmu Perpustakaan (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Nurdin Laugu dengan menggunting pita disaksikan para pejabat kapanewon, kalurahan, para pelajar dari jenjang TK sampai mahasiswa serta masyarakat setempat. Shining village atau Desa Bersinar mempunyai potensi untuk berperan dalam meningkatkan budaya literasi di masyarakat Desa. Agar seluruh masyarakat banyak membaca dan suka berliterasi sehingga pengetahuannya luas agar tidak mudah diserang berita hoaks. (Ewi/Ded)



Peresmian Pojok Baca di Besari Kalurahan Siraman

KR-Endar Widodo